



<b>News Title</b> : Pelaku Usaha CPO Diajak Bertransaksi di Bursa CPO Indonesia	
<b>Media Name</b> : Neraca	<b>Journalist</b> : Gro
<b>Publish Date</b> : 11 July 2024	<b>Tonality</b> : Positive
<b>News Page</b> : 11	<b>News Value</b> : 98,400,000
<b>Resources</b> : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Fajar Wibhiyadi (Direktur Utama ICDX)	<b>Ads Value</b> : 32,800,000
<b>Section/Rubrication</b> : Industri Perdagangan	<b>Topic</b> : Bursa CPO

# Pelaku Usaha CPO Diajak Bertransaksi di Bursa CPO Indonesia

Pontianak - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengajak pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Kalimantan Barat untuk berpartisipasi pasiaaktif dalam transaksi Bursa CPO Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan transaksi di Bursa CPO Indonesia agar semakin likuid, dipercaya, dan mencerminkan harga pasar.

## ■ NERACA

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengungkapkan, “kami mengajak para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi melalui Bursa CPO Indonesia. Pelaku usaha CPO diharapkan untuk tidak lagi menggunakan harga dari bursa Malaysia dan Rotterdam, namun sepenuhnya menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia.”

Kasan mengungkapkan, Literasi Bursa CPO di Pontianak merupakan kegiatan literasi keempat yang dilaksanakan Bappebti tahun ini.

Sementara itu, tiga kota sebelumnya yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan literasi serupa adalah Jakarta, Medan, dan Pekanbaru. Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Perdagangan untuk melakukan literasi dan edukasi yang masif terkait implementasi Bursa CPO Indonesia.

“CPO merupakan komoditas strategis yang memiliki potensi ekspor tinggi sehingga perlu dioptimalkan. Untuk itu, Bappebti

membentuk Bursa CPO Indonesia yang diresmikan pada Oktober 2023 sebagai salah satu usaha dalam tata kelola CPO,” imbuh Kasan.

Kasan menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membentuk harga acuan yang dapat digunakan untuk mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Selain itu, agar harga acuan biodiesel yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi lebih akurat. Harga acuan yang terbentuk dapat digunakan sebagai pembobot harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO.

“Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi rujukan untuk penetapan harga tandan buah segar (TBS) dan biodiesel. Untuk itu, kami berharap Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan harga TBS. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga diharapkan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga acuan

biodiesel,” ungkap Kasan.

Kasan mengungkapkan, saat ini Bursa CPO Indonesia memfasilitasi perdagangan CPO secara fisik dan futures. Nilai transaksi CPO futures dalam Bursa CPO Indonesia mencapai 17.356 lot atau 86.780 ton pada Januari - Juni 2024.

Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota Bursa CPO Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 49 bulan berturut-turut pada Mei 2024 dengan nilai sebesar USD2,93 miliar.

Nilai tersebut naik 7,7 persen (MoM) dibandingkan April 2024 senilai USD2,72 miliar. “Salah satu penopang surplus neraca perdagangan pada Mei 2024 adalah nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD4,26 miliar. Nilai ekspor nonmigas tersebut tentunya didukung dengan nilai ekspor CPO yang mencapai USD 1,08 miliar,” tutur Kasan.

Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita menyatakan, tujuan pembentukan bursa CPO adalah untuk penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia. Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat membentuk harga CPO yang menjadi rujukan di pasar domestik maupun internasional.

Hal tersebut karena harga yang tercipta di Bursa CPO Indonesia diperoleh secara transparan, adil, dan sesuai dengan waktu nyata.

Olvy melanjutkan, Bursa CPO Indonesia dibentuk berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana

telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Omoditi (PBK).

Undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk membentuk acuan harga melalui bursa berjangka. Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah di Bursa Berjangka dan Peraturan Tata Tertib (PTT) sebagai pedoman teknisnya.

“Kebijakan perdagangan CPO melalui bursa CPO Indonesia bersifat sukrela untuk pasar dalam negeri. Namun, dalam perkembangannya tentu harus mampu mendorong penguatan ekspor komoditas CPO di pasar global,” imbuh Olvy.

Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi mengatakan, manfaat adanya Bursa CPO Indonesia harus terus disebarluaskan kepada seluruh pelaku usaha CPO. Untuk itu, ICDX berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan literasi kepada para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia.

“Kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialiasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX untuk implementasi Bursa CPO di Indonesia. Para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Pontianak diharapkan memahami manfaat dan mekanisme transaksi perdagangan CPO melalui bursa sehingga semakin banyak pelaku usaha yang bertransaksi CPO dibursa,” ujar Fajar. ●gro